

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN , PELAYANAN
FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KABUPATEN MALANG**

(STUDI KASUS KPP PRATAMA KEPANJEN)

SKRIPSI



Oleh :

NURUSSAKINAH

NIM : 14520063

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN , PELAYANAN
FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KABUPATEN MALANG
(STUDI KASUS KPP PRATAMA KEPANJEN)**

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh :

**NURUSSAKINAH
NIM : 14520063**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN , PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN MALANG (STUDI KASUS KPP PRATAMA KEPANJEN)

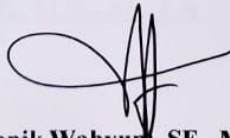
SKRIPSI

Oleh :

NURUSSAKINAH
NIM : 14520063

Telah disetujui pada tanggal

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 197203222008012005

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 197203222008012005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN , PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN MALANG

(STUDI KASUS KPP PRATAMA KEPANJEN)

SKRIPSI

Oleh:

NURUSSAKINAH

NIM.14520063

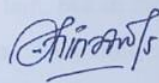
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada /Juli 2021

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji

Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.SA

NIP. 1975103020160801 2 048

()

2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

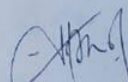
NIP.19720322200801 2 005

()

3. Penguji Utama

Fajar Nurdin M.Ak

NIP.19831005201903 1 006

()



Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP.19720322200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurussakinah
NIM : 14520063
Fakultas/jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN , PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN MALANG (STUDI KASUS KPP PRATAMA KEPANJEN) adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat ini saya buat dengan benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 28 Juli 2021

Hormat saya,



Nurussakinah

NIM: 14520063

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-Nya karya ini dapat selesai tepat waktu. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladannya.

Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

KELUARGAKU

Ayah dan ibuku yang selalu menjadi motivasi utamaku dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa ayah dan ibu yang tak pernah berhenti, atas keringat kerja kerasnya selama ini, atas kepercayaannya. Serta kakak-kakakku dan adikku terimakasih.

ORANG-ORANG TERDEKATKU

Terimakasih sangat aku ucapkan pada kalian semua teman-teman Akuntansi UIN Maliki Malang Angkatan 2014 yang selalu bersama dalam menjalani hari hari selama 4 tahun perkuliahan ini. Terimakasih juga kepada Indra Irawan, Yunita Ekasari, Linda Nur Khasanah, Stifani Roikhatun Jannah, Milla Elviana, Idhsa Ilhami, Dwi Rachmawati, Unsa Farichatun, Irfana Atsil selaku teman seperjuangan yang selalu menyisihkan waktunya untuk membantu serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

HALAMAN MOTTO

**“Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat,
asalkan kamu tidak berhenti berusaha”- Confucius**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan lindungan-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Kepanjen).

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Ibu Meldona, SE., MM., Ak selaku Dosen Wali Penulis yang selalu memberikan bimbingan dalam proses perkuliahan penulis.
6. Ayah, ibu, kakak-kakakku, dan adikku yang selalu memberikan doa terbaik serta dukungan moril, materiil, dan spiritual.
7. Indra irawan yang selalu menemani , mendukung, menyemangati untuk menyelesaikan skripsi.

8. Teman-teman Akuntansi angkatan 2014, menjadi teman terbaik selama 4 tahun menuntut ilmu di kampus UIN Maliki Malang ini, saling mendorong untuk terus berjuang dan bersama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Suka duka bahagia telah kita lewati bersama.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amiin ya robbal alamin

Malang, 28 Juli 2021

Nurussakinah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis	20
2.2.1 Teori Pajak.....	20
2.2.1.1. Pengertian Pajak	20
2.2.1.2. Fungsi Pajak	21
2.2.1.3. Jenis-Jenis Pajak	25
2.2.1.4. Hak dan Kewajiban Pajak.....	26
2.2.1.5. Subjek dan Objek Pajak.....	28
2.2.1.6. Syarat Pemungutan Pajak	38
2.2.1.7. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	40
2.2.1.8. Tarif dan Utang Pajak.....	43
2.2.2 Kepatuhan Pajak.....	46
2.2.3 Wajib Pajak.....	49
2.2.3.1. Kewajiban Wajib Pajak	50
2.2.3.2. Penyimpangan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	50
2.2.4 Pelayanan Fiskus	52
2.2.5 Sanksi Perpajakan	54
2.2.6 Kajian Dalam Perspektif Islam	56
2.2.6.1. Pajak Dalam Perspektif Islam	56
2.2.6.2. Sanksi Dalam Perspektif islam.....	57
2.2.6.3. Pelayanan Dalam Perspektif Islam.....	58
2.2.6.4. Kepatuhan Dalam Perspektif Islam.....	58
2.3 Kerangka Konseptual.....	59
2.4 Hipotesis Penelitian	61

2.4.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan	61
2.4.2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan	62
2.4.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan	62
BAB 3 METODE PENELITIAN	64
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	64
3.2 Lokasi Penelitian.....	64
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	64
3.4 Teknik dan Pengambilan Sampel	65
3.5 Data dan Jenis Data.....	65
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.7 Definisi Operasional Variabel	66
3.7.1. Variabel Dependen	66
3.7.2. Variabel Independen	67
3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas	69
1.Uji Validitas	69
2.Uji Reliabilitas	69
3.Uji Asumsi Klasik.....	70
Uji Normalitas.....	70
4.Uji Multikolinearitas.....	71
5.Uji Heterokedastisitas	71
6.Uji Autokorelasi.....	71
3.9 Analisis Data	72
a. Uji F.....	74
b. Uji t.....	74
c. Koefisien Determinasi	75
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	76
4.1.1. Sejarah Perkembangan Instansi.....	76
4.1.2. Letak dan Bidang Usaha Instansi	77
4.1.3. Visi dan Misi KPP Pratama Kepanjen	82
4.1.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Jabatan	82
4.2 Analisis Data	86
4.2.1. Deskripsi Responden.....	86
4.2.2. Karakteristik Responden	87
4.2.3. Statistika Deskriptif Variabel Penelitian.....	89
4.2.3.1. Analisis Deskriptif Variabel X1	89
4.2.3.2. Analisis Deskriptif Variabel X2.....	90
4.2.3.3. Analisis Deskriptif Variabel X3.....	91
4.2.3.4. Analisis Deskriptif Variabel Y.....	91
4.2.4. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	92
4.2.5. Uji Asumsi Klasik	94
4.2.5.1. Uji Normalitas	94
4.2.5.2. Uji Multikolieritas	96
4.2.5.3. Uji Heteroskedastisitas	96
4.2.5.4. Uji Autokorelasi	98
4.2.6. Uji Regresi Berganda	98

4.2.6.1. Uji Koefisien Determinasi.....	100
4.2.6.2. Uji Parameter Simultan (Uji F)	101
4.2.6.3. Uji Parameter Parsial (Uji t).....	102
4.3 Pembahasan.....	103
BAB 5 PENUTUP.....	108
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Nasional.....	2
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak KPP Pratama Kepanjen	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.3 Tarif Pajak Progresif	44
Tabel 3.1 Indikator Variabel Dependen	67
Tabel 3.2 Indikator Variabel Independen.....	67
Tabel 3.3 Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson.....	72
Tabel 4.1 Jumlah SDM di KPP Pratama Kepanjen (Golongan)	80
Tabel 4.2 Jumlah SDM di KPP Pratama Kepanjen (Pendidikan).....	80
Tabel 4.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Kepanjen	81
Tabel 4.4 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen.....	82
Tabel 4.5 Kuesioner Yang Disebar	87
Tabel 4.6 Demografi Responden (Jenis Kelamin)	87
Tabel 4.7 Demografi Responden (Usia).....	87
Tabel 4.8 Demografi Responden (Pendidikan)	88
Tabel 4.9 Demografi Responden (Pekerjaan)	88
Tabel 4.10 Statistik Deskriptif Pengetahuan Perpajakan (X1).....	89
Tabel 4.11 Statistik Deskriptif Pelayanan Fiskus (X2)	90
Tabel 4.12 Statistik Deskriptif Sanksi Pajak (X3)	91
Tabel 4.13 Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	92
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas.....	92
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	93
Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak (X3).....	93
Tabel 4.17 Hasil Uji Reliabilitas Pelayanan Fiskus (X2)	94
Tabel 4.18 Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X1)	94
Tabel 4.19 Hasil Uji Multikolinieritas	96
Tabel 4.20 Hasil Uji Autokorelasi	98
Tabel 4.21 Hasil Uji Regresi Berganda.....	99
Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	100
Tabel 4.23 Hasil Uji Parameter Simultan (Uji F)	101
Tabel 4.24 Hasil Uji Parameter Parsial (Uji t)	102

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	60
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kepanjen	86
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	95
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastitas.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Data Responden

Lampiran 3 Biodata Peneliti

Lampiran 4 Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Nurussakinah. 2021, SKRIPSI. Judul : “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Kepanjen)”

Pembimbing :Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak.,CA

Kata Kunci :Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak didasari pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan Perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak memahami peraturan perpajakan. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Pelayanan Fiskus merupakan pelayanan pada sektor perpajakan. Sanksi Pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dan dilakukan dengan metode survey terhadap wajib pajak di KPP Pratama Kepanjen. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 106.166 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini 100 (seratus) wajib pajak. Sampel di peroleh secara *random sampling*. Metode pengumpulan data melalui kuesioner, dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan (x1) memiliki nilai t hitung sebesar 0,961 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985. Variabel pelayanan fiskus (x2) memiliki nilai t hitung sebesar 2,092 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985. Variabel sanksi pajak (x3) memiliki nilai t hitung sebesar 0,778 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985. Maka disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Nurussakinah. 2021, *THESIS*. Title : "*The Influence of Tax Knowledge, Fiscus Services, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance (Case Study of KPP Pratama Kepanjen)*"

Supervisor :Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

Keywords: *Tax Knowledge, Fiscus Service, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

Taxpayer compliance is the awareness of the taxpayer to fulfill his tax obligations. Taxpayer compliance is based on the taxpayer's knowledge of taxation in fulfilling tax obligations. Tax knowledge is the ability of taxpayers to understand tax regulations. Improving taxpayer compliance can also be improved by improving tax services and tax sanctions. Fiscal Service is a service in the tax sector. Tax sanctions are a deterrent so that taxpayers do not violate tax regulations. This study aims to determine whether knowledge of taxation, tax service services, and tax sanctions can affect taxpayer compliance. Taxpayer compliance is a factor to maximize tax revenue.

This research was conducted using a quantitative approach, and was conducted using a survey method to taxpayers at KPP Pratama Kepanjen. The population in this study amounted to 106,166 taxpayers. The sample in this study is 100 (one hundred) taxpayers. Samples were obtained by random sampling. Methods of collecting data through questionnaires, and analyzed using multiple linear regression analysis using the SPSS program.

The results showed that the tax knowledge variable (x1) had a t-count value of 0.961 which was smaller than the t-table of 1.985. The tax service variable (x2) has a t-count value of 2.092, which is greater than the t-table of 1.985. The tax penalty variable (x3) has a t-count value of 0.778 which is smaller than the t-table of 1.985. It is concluded that the variable knowledge of taxation, and tax sanctions have no effect on taxpayer compliance. While the tax service variable has a positive and significant effect on taxpayer compliance.

نبذة مختصرة

نوروساكيه ٢٠١٢ ، أطروحة. العنوان: "تأثير المعرفة الضريبية والخدمات المالية والعقوبات الضريبية على امتثال دافعي الضرائب (دراسة حالة لمكتب خدمات الضرائب براتاما كييانجين)"
المشرف: دكتور. الحاجة. نانيك واهيوني ،
الكلمات الرئيسية: المعرفة الضريبية ، الخدمة المالية ، العقوبات الضريبية ،
امتثال دافعي الضرائب

امتثال دافعي الضرائب هو وعي دافع الضرائب للوفاء بالتزاماته الضريبية. يعتمد امتثال دافعي الضرائب على معرفة دافع الضرائب بالضرائب في الوفاء بالتزامات الضريبية. المعرفة الضريبية هي قدرة دافعي الضرائب على فهم اللوائح الضريبية. يمكن أيضاً تحسين امتثال دافعي الضرائب من خلال تحسين الخدمات الضريبية والعقوبات الضريبية. الخدمة المالية هي خدمة في قطاع الضرائب. العقوبات الضريبية هي رادع حتى لا ينتهك دافع الضرائب اللوائح الضريبية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت المعرفة بالضرائب وخدمات الخدمات الضريبية والعقوبات الضريبية يمكن أن تؤثر على امتثال دافعي الضرائب. يعد امتثال دافعي الضرائب عاملاً لزيادة الإيرادات الضريبية.

تم إجراء هذا البحث باستخدام نهج كمي ، وتم إجراؤه باستخدام طريقة مسح لدافعي الضرائب في مكتب خدمة الضرائب في كييانجين براتاما. بلغ عدد السكان في هذه الدراسة ١٦٦,١٠٦ من دافعي الضرائب. العينة في هذه الدراسة هي مائة دافع ضرائب. تم الحصول على العينات عن طريق أخذ العينات العشوائية. طرق جمع البيانات من خلال الاستبيانات وتحليلها باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد باستخدام برنامج خدمة حل منتج الإحصاءات

أظهرت النتائج أن متغير المعرفة الضريبية له قيمة t قدرها ٠,٩٦١ وهي أصغر من جدول t البالغ ١,٩٨٥. متغير خدمة الضرائب له قيمة حساب t تبلغ ٢,٠٩٢، وهي أكبر من جدول t البالغ ١,٩٨٥. متغير عقوبة الضريبة له قيمة t تساوي ٠,٧٧٨ وهي أصغر من جدول t البالغ ١,٩٨٥. وخلص إلى أن المعرفة المتغيرة للضرائب والعقوبات الضريبية ليس لها أي تأثير على امتثال دافعي الضرائب. في حين أن متغير الخدمة الضريبية له تأثير إيجابي وهام على امتثال دافعي الضرائب.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu negara dapat di nilai dari perekonomian negara. Perekonomian di Indonesia belum dapat dikatakan maju, karena perekonomian di Indonesia belum dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, pemerintah harus membangun sarana prasarana dan meningkatkan pelayanan untuk kepuasan masyarakat. Dalam merealisasikan kegiatan tersebut pemerintah membutuhkan anggaran yang besar. Salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk mendapatkan anggaran tersebut dengan meningkatkan penerimaan dana dari dalam negeri dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.(Mardiasmo, 2016:3). Pajak ini nantinya akan digunakan untuk menunjang pembangunan sarana prasarana dan perbaikan pelayanan publik. Namun karena kurangnya pemahaman masyarakat akan peranan pajak dengan benar seringkali masyarakat mengabaikan kewajiban perpajakan dan hanya dapat mengeluh atas kebijakan pemerintah tentang ketentuan pajak tanpa ada kontribusi kepada negara. Maka dari itu, sangatlah penting bagi masyarakat mengetahui

peranan pengetahuan perpajakan dengan benar demi kemajuan pajak di Indonesia dan menciptakan wajib pajak yang patuh.

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Nurmantu, 2005). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi tinggi rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Permasalahan yang sering terjadi dalam pungutan pajak yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajak atau tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cukup rendah. Hal ini dapat terlihat dari pajak yang diterima tidak memenuhi target penerimaan perpajakan Indonesia selama lima tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perkembangan Penerimaan Pajak Nasional, (2015-2020)

(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target penerimaan pajak	Penerimaan pajak	Capaian
2015	1.294,25	1.055	81,51%
2016	1.539,17	1.283,6	83,39%
2017	1.472,7	1.339,8	90,97%
2018	1.424	1.315,9	92,40%
2019	1.577,56	1.332,1	84,44%
2020	1.190,8	1.019,56	85,61%

Sumber : www.pajak.go.id

Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia masih rendah, baik untuk melaporkan surat pemberitahuan maupun

membayar pajak. Kondisi ini menyebabkan penerimaan negara menjadi tidak optimal dan mengganggu realisasi pembangunan sarana di Indonesia. Jika penerimaan negara bisa melebihi dari hasil tersebut, maka pembangunan akan berjalan lancar dan dapat terwujudlah keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, maka diperlukan pengetahuan tentang peraturan dan tata cara perpajakan (Fathoni,2015).

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. (Utomo, 2011). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan penerimaan pajak negara. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan. Hal ini terbukti dari beberapa hasil penelitian bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak seperti menurut Nisa'(2016) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Witono (2008) menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan juga hasil penelitian Hidayati (2014) dan Wijaya (2014) juga menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian Pancawati (2011) dan Winerrungan (2013) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena adanya perbedaan dalam hasil penelitian inilah maka pengetahuan perpajakan

menjadi salah satu variabel dalam penelitian ini untuk melihat apakah variabel ini memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kepanjen. Selain untuk memenuhi kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan dikatakan penting agar wajib pajak dapat terhindar dari sanksi-sanksi pajak yang berlaku, serta untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pelayanan dari fiskus dan sarana prasarana yang mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelayanan fiskus merupakan pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pegawai pajak (fiskus) akan mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan membuat wajib pajak semakin patuh. Semakin pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian Arum (2012), Winerungan (2013), dan Fathoni (2015) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian Viega (2017), dan Isna' (2017) bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena adanya perbedaan hasil penelitian tersebut pelayanan fiskus digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan

kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. (Mardiasmo, 2016: 62). Setiap pelanggaran atas peraturan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi tingkat pelanggaran terkecil hingga tingkat pelanggaran terberat. Hal ini tertera dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Peraturan tersebut dibuat untuk meminimalkan tindak pelanggaran hukum yang dilakukan wajib pajak maupun bagi fiskus dan memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam hal ini semakin tegas sanksi pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terbukti dari beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti menurut Widagsono (2017) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jatmiko (2006) dan Tiraada (2013) juga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti hasil penelitian Hidayati (2014) dan juga penelitian Winerungan (2013). Karena adanya perbedaan hasil penelitian inilah maka sanksi pajak menjadi variabel dari penelitian untuk membuktikan apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kepanjen. Tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama

Kepanjen cukup tinggi, dapat dilihat dari tabel penerimaan pajak di KPP Pratama Kepanjen selama lima tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1.2

Penerimaan Pajak KPP Pratama Kepanjen (2016-2020)

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Target penerimaan pajak	Penerimaan pajak	Capaian
2016	659,181	503,147	76,32%
2017	634,966	689,542	108,59%
2018	959,881	954,911	99,48%
2019	763,119	732,481	95,98%
2020	776,941	870,161	111,99%

Sumber : KPP Pratama Kepanjen

Dalam penelitian ini memilih objek penelitian di KPP Pratama Kepanjen, karena untuk mengetahui apakah dengan adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, dan pelayanan yang diberikan fiskus, serta ketegasan dari sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan juga memilih objek penelitian ini karena tingkat kepatuhan pajak di daerah KPP Pratama Kepanjen ini meningkat. Hal ini terlihat dari kenaikan penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar 108,59% dari target penerimaan pajak tahun 2017. Dan juga pada tahun 2020 penerimaan pajak melebihi target yang diinginkan sebesar 111,99%. (www.indopremier.com). Maka dari itu menarik untuk dijadikan objek penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Apakah faktor

pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak ini memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Maka dari itu perlu untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pajak secara intensif, khususnya bagi wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan keterangan berikut maka menarik untuk dijadikan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ”**

1.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat menambah wawasan informasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi, khususnya akuntansi perpajakan dan merupakan informasi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

b. Bagi Wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.

c. Bagi Peneliti

Sebagai wadah untuk mengaplikasikan yang diperoleh selama perkuliahan dan peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dan berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebelumnya sudah pernah dilakukan. Namun, hasil dari penelitian masih berbeda-beda. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur, (Muliari, dan Setiawan, 2010)	Variabel independen (X): sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak Variabel dependen (Y): kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi linier berganda	Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Begitu juga dengan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, (Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati 2011)	Variabel independen (X): kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan,	Analisis regresi linier berganda	Kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas sistem

		efektifitas system perpajakan Variabel dependen (Y): kemauan membayar pajak		perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak
3.	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama semarang candisari), (Winda Kurnia Fikriningrum, 2012)	Variabel independen (X): pengetahuan perpajakan, efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus Variabel dependen (Y): kemauan membayar pajak	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak
4.	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah KPP Pratama Cilacap), (Harjanti Puspa Arum, 2012)	Variabel independen (X): kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak Variabel dependen (Y): kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi linier berganda	kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Analisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada wpop di	Variabel independen (X): kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda,	Analisis regresi linier berganda	Kesadaran perpajakan, sikap fiskus, lingkungan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sikap rasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

	wilayah kpp pratama semarang, (Anisa Nirmala Santi, 2012)	sikap fiskus Variabel dependen (Y): kepatuhan wajib pajak		pajak
6.	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Manado dan KPP Blitung, (Oktaviane Lidya Winerungan, 2013)	Variabel independen (X): sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak Variabel dependen (Y): kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi linier berganda	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dikedua kota tersebut terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan dimasing-masing kota, yang selanjutnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
7.	Pengaruh <i>sunset policy</i> , pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (Ngadiman dan Daniel Huslin , 2015)	Variabel independen (X): <i>sunset policy</i> , pelayanan fiskus, sanksi pajak Variabel dependen (Y): kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi linier berganda	Sunset policy tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
8.	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan ancaman sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri, (Agus Ahmad Fathoni, 2015)	Variabel independen (X): kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, ancaman sanksi pajak Variabel dependen (Y):	Analisis regresi linier berganda	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan ancaman sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan

		kepatuhan wajib pajak		
9.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sumenep, (Afifatun Nisa' , 2016)	Variabel independen (X): pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan Variabel dependen (Y): kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi linier berganda	Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (Seto Widagsono, 2017)	Variabel independen (X): pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas Variabel dependen (Y): kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi linier berganda	Pengetahuan perpajakan dan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber : data diolah oleh peneliti

Dengan adanya penelitian terdahulu maka kita dapat membandingkan hasil penelitian sekarang sebagai bahan acuan pembaharuan informasi. Berikut ini persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang sebagai berikut :

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun ⁵⁴	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
1.	Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur, (Muliari, dan Setiawan, 2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen : sanksi pajak 2. Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak 3. Menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda 4. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode <i>simple random sampling</i> 5. Pengambilan data melalui kuesioner 6. Responden 100 wajib pajak orang pribadi 7. Pengolahan data menggunakan SPSS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen: kesadaran wajib pajak 2. Periode penelitian 2010-2011 3. Lokasi penelitian di KPP Pratama Denpasar Timur 4. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen: pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus 2. Periode penelitian 2018-2021 3. Lokasi penelitian di KPP Pratama Kepanjen 4. Sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen : pengetahuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen:

	<p>uhi kema uan membayar pajak, (Pancawati Hardiningsi h dan Nila Yulianawati 2011)</p>	<p>perpajakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda 3. Kuesioner dan survey 4. Pengolahan data spss 5. Hasil penelitian variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan 	<p>(X):kesada ran membayar pajak, pemahama n peraturan perpajakan , efektifitas system perpajakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Variabel dependen (Y): kema uan membayar pajak 3. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode <i>convinience random sampling</i> 4. Lokasi penelitian KPP Jepara 5. Menggunakan 94 responden 6. Periode 2009-2011 	<p>pelayanan fiskus, sanksi pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 3. Periode penelitian 2018-2021 4. Lokasi penelitian di KPP Pratama Kepanjen 5. Responde n 100 wajib pajak
3.	<p>Analisis faktor-faktor yang mempengar uhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (studi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen: pengetahuan perpajakan, pelayan fiskus 2. Menggunakan analisis linier berganda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independe n: kesadaran membayar pajak, persepsi efektifitas sistem pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independe n : sanksi pajak 2. Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 3. Lokasi

	kasus pada kantor pelayanan pajak pratama semarang candisari), (Winda Kurnia Fikriningrum, 2012)	3. Kuesioner dan survey 4. Mengolah data dengan spss 5. Hasil penelitian pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan	2. Variabel dependen: kewajiban membayar pajak 3. Lokasi penelitian KPP Pratama Semarang 4. Teknik incidental sampling 5. Periode penelitian 2011-2012 6. Hasil penelitian pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan persepsi efektifitas sistem pajak berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak	penelitian KPP Pratama Kapanjen 4. Periode penelitian 2018-2021 5. Teknik simple random sampling 6. Hasil penelitian pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan	1. Variabel independen: pelayanan fiskus, dan sanksi pajak 2. Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 3. Survey dan kuesioner	1. Variabel independen: kesadaran wajib pajak 2. Lokasi KPP Pratama Cilacap 3. Periode	1. Variabel independen: pengetahuan perpajakan 2. Lokasi penelitian di KPP Pratama Kapanjen

	kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah KPP Pratama Cilacap), (Harjanti Puspa Arum, 2012)	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan teknik simple random sampling Analisis regresi linier Mengolah data dengan spss Hasil penelitian pelayan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> penelitian 2011-2012 Responden 97 wajib pajak Hasil penelitian sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> Responden 100 wajib pajak Periode penelitian 2018-2021 Hasil penelitian sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Analisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada wpop di wilayah kpp pratama semarang, (Anisa Nirmala Santi, 2012)	<ol style="list-style-type: none"> variabel independen: sanksi pajak, pelayanan fiskus variabel dependen: kepatuhan wajib pajak analisis regresi linier berganda survey dan kuesioner responden 100 wajib pajak pengolahan data dengan spss hasil penelitian pelayanan fiskus berpengaruh terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen: kesadaran perpajakan, sikap rasional Menggunakan teknik incidental sampling Periode penelitian 2011-2012 Lokasi penelitian KPP Pratama Semarang Hasil penelitian sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan 	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen: pengetahuan perpajakan Menggunakan teknik simple random sampling Periode penelitian 2018-2021 Lokasi penelitian di KPP Pratama Kepanjen Hasil penelitian sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap

		kepatuhan wajib pajak	terhadap kepatuhan wajib pajak	kepatuhan wajib pajak
6.	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Manado dan KPP Bitung, (Oktaviane Lidya Winerungan, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen: pelayanan fiskus, sanksi pajak 2. Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 3. Survey dan kuesioner 4. Teknik simple random sampling 5. Analisis regresi linier berganda 6. Hasil penelitian sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen: sosialisasi perpajakan 2. Lokasi penelitian di KPP Manado dan KPP Bitung 3. 50 responden 4. Periode penelitian 2013-2014 5. Hasil penelitian pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. variabel independen: pengetahuan perpajakan 2. lokasi penelitian KPP Pratama Kepanjen 3. periode penelitian 2018-2021 4. 100 responden 5. Hasil penelitian pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	Pengaruh <i>sunset policy</i> , pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (Ngadiman dan Daniel Huslin , 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. variabel independen: sanksi pajak 2. variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 3. analisis regresi berganda 4. survey dan kuesioner 5. teknik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. variabel independen: sunset policy, tax amnesty 2. periode penelitian 2015-2016 3. lokasi penelitian KPP Pratama Jakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen: pengetahuan perpajakan , pelayanan fiskus 2. Periode penelitian 2018-2021 3. Lokasi

		simple random sampling 6. 100 responden	Kembangan 4. hasil penelitian sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	penelitian KPP Pratama Kepanjen 4. Hasil penelitian sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
8.	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan ancaman sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri, (Agus Ahmad Fathoni, 2015)	1. variabel independen: pelayanan fiskus, sanksi pajak 2. variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 3. survey dan kuesioner 4. analisis regresi linier berganda 5. 100 responden 6. Teknik simple random sampling 7. Hasil penelitian pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	1. variabel independen: kesadaran wajib pajak 2. lokasi penelitian KPP Pratama Kediri 3. periode penelitian 2015-2016 4. hasil penelitian sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	1. variabel independen: pengetahuan perpajakan 2. lokasi penelitian KPP Pratama Kepanjen 3. periode penelitian 2018-2021 4. hasil penelitian sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
9.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,	1. variabel independen: pengetahuan	1. variabel independen: kesadaran	1. variabel independen: kesadaran

	Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sumenep, (Afifatun Nisa', 2016)	<ul style="list-style-type: none"> perpajakan, sanksi pajak 2. variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 3. kuesioner 4. analisis regresi linier berganda 	<ul style="list-style-type: none"> n wajib pajak 2. objek penelitian UMKM di kab. Sumenep 3. hasil penelitian secara simultan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> n wajib pajak 2. objek penelitian wajib pajak di KPP Pratama Kepanjen 3. hasil penelitian pengetahuan perpajakan, sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
10.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (Seto Widagsono, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> 1. variabel independen: pengetahuan perpajakan, sanksi pajak 2. variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 3. lokasi penelitian di KPP Pratama Kepanjen 4. teknik simple random sampling 5. metode analisis regresi linier 	<ul style="list-style-type: none"> 1. variabel independen: religiusitas 2. 120 responden 3. Hasil penelitian pengetahuan perpajakan, sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 	<ul style="list-style-type: none"> 1. variabel independen: pelayanan fiskus 2. 100 responden 3. Hasil penelitian pengetahuan perpajakan, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

		6. kuesioner dan survey	pajak	
--	--	----------------------------	-------	--

Sumber : data diolah oleh peneliti

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1. Teori Pajak

2.2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam Waluyo (2010:2) :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas terdapat perbedaan pada gaya bahasa tetapi memiliki persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Dan dari beberapa pendapat dapat ditarik kesimpulan ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- b. Pajak dapat dipaksakan.
- c. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.
- d. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung.
- e. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*.

2.2.1.2.Fungsi Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (2016 :32) Fungsi pajak adalah kegunaan pokok atau manfaat pokok pajak. Pajak adalah alat untuk menentukan politik perekonomian, dan pajak memiliki

kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karena pengenaan pajak yang dipandang dalam bidang ekonomi harus diatur seefisien mungkin dan tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang.

Untuk menjalankan tugas-tugas negara diperlukan biaya. Demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsi pemerintahannya membutuhkan pengeluaran yang akan dibiayai dari penerimaan pajak. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) kedalam kas negara (anggaran negara) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi yang dimana pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana tunggakan pajak dari wajib pajak maupun objek pajaknya secara menyeluruh dan tidak ada penyelewengan dana yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi tambahan atas fungsi utama pajak. Fungsi pajak sebagai *regulerend* adalah usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur atau mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. (Devano dan Rahayu, 2010:26)

Menurut Mardiasmo (2016:4) disebutkan, “Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi pajak :

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Selaras dengan fungsi menurut Resmi (2013:3) dalam kaitannya dengan bidang pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata maka fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *regulerend* (pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Berdasarkan beberapa fungsi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi sebagai penerimaan dimana pajak merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi besar untuk pembangunan negeri, oleh karena itu pajak dapat bersifat memaksa dalam pemungutan pajak terutang bagi wajib pajak yang sudah diatur dalam undang-undang. Dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, misalnya dengan

rendahnya tarif pemungutan pajak sehingga dapat mendorong investasi dalam negeri.

2.2.1.3. Jenis-jenis pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) Pajak dikelompokkan dalam beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya yaitu sebagai berikut :

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan ke orang lain.

Contoh : pajak pertambahan nilai

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

3. Menurut lembaga pemungutannya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- 1. Pajak propinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- 2. Pajak kabupaten/kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.2.1.4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1. Kewajiban wajib pajak

Kewajiban pajak itu timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya.
- b. Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dikenakan pajak.

Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari wajib pajak dengan cara mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT). Setiap

orang yang telah menerima SPT pajak dari inspeksi pajak mempunyai kewajiban :

1. Mengisi SPT pajak.
2. Menandatangani SPT.
3. Mengembalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik wajib pajak.

2. Hak-hak Wajib Pajak

Wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis, kesalahan menghitung tarip atau kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak.
- b. Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat terhadap ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat.

- c. Mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, apabila keberatan yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi.
- d. Meminta mengembalikan pajak (retribusi), meminta pemindah bukuan setoran pajak ke pajak lainnya, atau setoran tahun berikutnya.
- e. Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana kalau ada petugas pajak yang menimbulkan kerugian atau membocorkan rahasia perusahaan atau pembukuan sehingga menimbulkan kerugian pada wajib pajak.

2.2.1.5. Subjek dan objek pajak

A. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak luar negeri dan subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :

a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

- 1) Orang pribadi yang tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- 2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek pajak badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Subjek pajak warisan, yaitu :

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing.

2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain memperoleh penghasilan di Indonesia.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.

4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas, seperti :

- a. Keuntungan karena pembebasan utang.
- b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- d. Hadiah undian.

Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

1. batuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbanga keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan , sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan.
4. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
6. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dan penyertaan modal

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
8. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
 9. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7 , dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
 10. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 11. penghasilan yang diterima atau perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

- a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
 - b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
12. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
13. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
14. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

2.2.1.6.Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh :

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.2.1.7.Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8) tata cara dalam pemungutan pajak yaitu berdasarkan :

1. stelsel pajak

pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel :

a. stelsel nyata (*rirel stelsel*)

pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih

realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel anggapan adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, dan begitu sebaliknya jika pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan maka kelebihannya bisa dijadikan sebagai penambah untuk tahun berikutnya.

2. Asas pemungutan pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. sistem pemungutan pajak

a. *official assessment system*

adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya biaya yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

1. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

c. *Withholding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

4. Timbul dan hapusnya utang pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak :

a. Ajaran formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

b. Ajaran materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assesment system*.

2.2.1.8. Tarif dan Utang Pajak

Ada empat macam tarif pajak :

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak dalam negeri.

Tabel 2.3

Tarif Pajak Progresif

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Mardiasmo(2016)

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.

- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap.
 - c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.
4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Secara teori pemungutan pajak tidak terlepas dari rasa keadilan, sebab keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan wajib pajak. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak dimaksud adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

Apabila melihat timbulnya utang pajak, bahwa utang pajak timbul karena Surat Keputusan Pajak (ajaran formal), ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*. Perbedaan dengan ajaran materiil bahwa utang pajak timbul karena undang-undang. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*. Hapusnya utang pajak disebabkan antara lain :

1. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke Kas Negara.

2. Kompensasi

3. Keputusan yang ditunjukkan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

4. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan uang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain, apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

5. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan pada umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi diberikan terhadap sanksi administrasinya.

6. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan keuangan Wajib Pajak.

2.2.2. Kepatuhan pajak

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan spt, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

Menurut Nurmantu (2005:70) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan. contohnya
2. kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak

yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan spt sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kriteria wajib pajak yang patuh dan dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak menurut Keputusan Menteri No 544/KMK.04/2000 tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 : wajib pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- d. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan

pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.2.3. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak atau wajib pajak badan.

Wajib pajak adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak.

Wajib pajak badan adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap.

Berdasarkan UU No 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi :

- a. Perseroan terbatas.
- b. Perseroan komanditer.
- c. Perseroan lainnya.
- d. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- e. Firma

- f. Kongsi
- g. Koperasi
- h. Dana pensiun
- i. Persekutuan
- j. Perkumpulan
- k. Yayasan
- l. Organisasi masa
- m. Organisasi sosial politik
- n. Organisasi lainnya
- o. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2.3.1. Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak memiliki kewajiban sebagai berikut ini :

- 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- 2. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
- 3. Membayar atau menyetor pajak
- 4. Membuat pembukuan atau pencatatan
- 5. Menaati pemeriksaan pajak
- 6. Melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
- 7. Membuat faktur pajak
- 8. Melunasi bea materai

2.2.3.2. Penyimpangan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Dalam pemungutan pajak masih terdapat hambatan-hambatan yang menjadi masalah dalam penerimaan pajak bagi negara. Hambatan ini dapat dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2.4. Pelayanan fiskus

Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.01/2012 Pasal 59 menjelaskan fungsi dari Kantor Pajak Pratama sebagai pelayanan fiskus, yaitu :

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan.
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. penyuluhan perpajakan.
- e. pelaksanaan registrasi wajib pajak.
- f. pelaksanaan ekstensifikasi.

- g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- h. pelaksanaan pemeriksaan pajak
- i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
- j. pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- k. pelaksanaan intensifikasi
- l. pembetulan ketetapan pajak.
- m. pengurangan pajak bumi dan bangunan serta perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- n. pelaksanaan administrasi kantor.

Adapun kewajiban fiskus yang telah diatur dalam UU perpajakan adalah :

- h. Kewajiban untuk membina wajib pajak
- i. Kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar
- j. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
- k. Kewajiban melaksanakan putusan

Sementara itu terdapat Hak-Hak fiskus yang diatur dalam UU perpajakan :

- a. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan.
- b. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak
- c. Hak menerbitkan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan
- d. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
- e. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi.
- f. Hak melakukan penyidikan.
- g. Hak melakukan pencegahan.
- h. Hak melakukan penyanderaan.

Pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan membuat wajib pajak semakin patuh. Semakin pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu pelayanan fiskus digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

2.2.5.Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi

perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2016:62).

Dalam undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan digolongkan menjadi dua macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah :

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

- a. Ketentuan sanksi pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu :

1. Denda pidana berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada

wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana kurungan

pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya.

3. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.2.6. Kajian Dalam Perspektif Islam

2.2.6.1. Pajak Dalam Perspektif Islam

Menurut (Inayah,2003:24) dalam istilah bahasa arab, “pajak” dikenal dengan “Adh-Dharibah” yang artinya adalah beban. Pajak disebut beban karena pajak merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya dianggap sebagai beban. Secara bahasa Adh-Dharibah memiliki banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Sedangkan menurut Qadim (2002:138) berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Dari beberapa pendapat tersebut, bahwa definisi menurut Qadim (2002) mengandung nilai-nilai syariah yang terangkum lima karakteristik pajak menurut syariah islam, yaitu :

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT
- b. Objeknya berupa harta
- c. Subjeknya merupakan kaum muslimin yang kaya.
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka.
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

2.2.6.2.Sanksi dalam Perspektif Islam

Sanksi menurut syariah Islam merupakan hukuman yang dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar peraturan yang berlaku, sehingga pelanggar enggan melakukan kesalahan tersebut (Widagsono,2017). Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229:

حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya : Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

2.2.6.3.Pelayanan dalam Perspektif Islam

Pelayanan mempunyai arti mengerti, memahami, dan merasakan sehingga penyampaianya dapat membuat orang merasa nyaman dan aman. Dalam hal ini pelayanan merupakan memberikan rasa empati berupa memberikan perhatian dan membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan tingkat kepuasan dan loyalitas dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Fathoni, 2015). Dalam hal ini memberikan pelayanan terbaik menurut syariah tersirat sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Qashas ayat 77 berikut ini :

وَابْتَغِ فِيهَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَدْسِ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ ۚ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Berbuat baiklah engkau (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu”.

2.2.6.4. Kepatuhan dalam Perspektif Islam

Patuh menurut syariah islam merupakan taat yang memiliki arti melaksanakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan (Nisa', 2016). Kepatuhan dalam Islam memiliki kedudukan yang berbeda seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ketaatan yang tersirat di ayat Al-Qur'an di atas merupakan ketaatan untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi dari larangan aturan Allah. Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, sepanjang peraturan tersebut tidak melenceng dari aturan Allah, maka diwajibkan pula untuk melaksanakan peraturan atau kebijakan pajak tersebut.

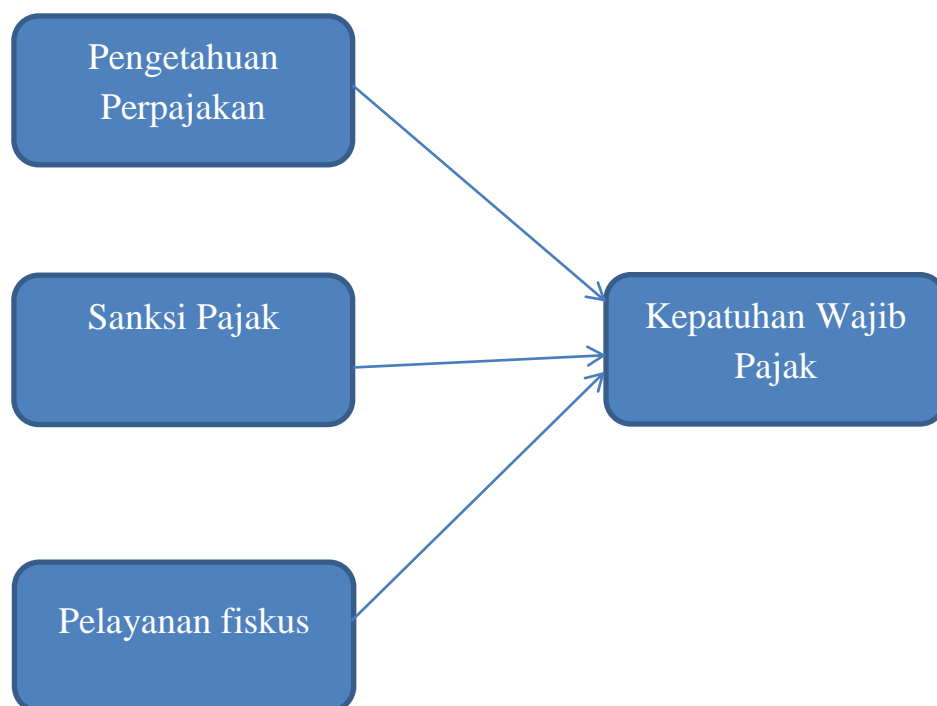
2.3 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konsep penelitian ini meliputi 2 variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen (bebas) dalam

penelitian ini adalah faktor pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Dan variabel dependen (terikat) adalah faktor kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara dua variabel ini bersifat hubungan satu arah, dimana variabel independen memberikan kontribusi pada variabel dependen. Dalam kerangka konsep ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen. Adapun kerangka konsep penelitian ini digambarkan dalam bentuk skema yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : diolah oleh peneliti

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Dengan demikian, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut harus dijawab pada hipotesis.

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Nisa', 2016). Hal ini didorong karena wajib pajak memahami bagaimana tata cara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Jika pengetahuan perpajakan wajib pajak rendah maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak karena kurangnya pengetahuan mereka memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terbukti dari beberapa hasil penelitian bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak seperti menurut Nisa'(2016) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Witono (2008) menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan juga hasil penelitian Hidayati (2014) dan Wijaya (2014) juga menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian Pancawati (2011)

dan Winerrungan (2013) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang pertama adalah :

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak

2.4.2 Pengaruh Pelayanan fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan fiskus merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan meningkatkan tingkat kepuasan dan loyalitas wajib pajak. Pelayanan fiskus memberikan pengaruh tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fathoni, 2015) . Hal ini dapat dilihat dalam penelitian Arum (2012), Winerungan (2013), dan Fathoni (2015) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian Viega (2017), dan Isna' (2017) bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang kedua adalah :

H2 : Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan alat pencegah yang dibuat agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan memberikan efek jera bagi wajib pajak jika melanggar (Widagsono, 2017). Sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dari

penelitian Widagsono (2017) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jatmiko (2006) dan Tiraada (2013) juga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti hasil penelitian Hidayati (2014) dan juga penelitian Winerungan (2013). Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang ketiga adalah :

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, yakni mengolah data-data yang telah didapatkan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini berlokasi di Kabupaten Malang di KPP Pratama Kepanjen dikarenakan selama 3 tahun terakhir tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kepanjen dikarenakan terdapat banyak instansi yang memperkerjakan wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan sehingga kita dapat mengamati seberapa besar pengaruh dan apa dampak yang timbul dari adanya pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, pelayanan fiskus ini bagi kepatuhan wajib pajak membayar kewajibannya ini.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 106.166 wajib pajak orang yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel secara acak sebanyak 100 jumlah total populasi. Sebagai aturan umum, ukuran sampel antara 30 sampai

dengan 500 bisa efektif tergantung dengan cara pengambilan sampel yang digunakan dan pertanyaan penelitian yang dipakai.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode *simple random sampling*, dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan sample dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. (Sugiyono, 2013 :64). Menggunakan teknik *simple random sampling* ini dapat mengin-efisiensi waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan. Penggunaan *simple random sampling* sangat tepat digunakan dalam penelitian kuantitatif deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 100 sample namun hanya 98 sampel yang digunakan penelitian ini karena 2 sampel lainnya dikatakan tidak valid data yang dihasilkan.

3.5 Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dihasilkan merupakan data primer karena merupakan data yang diperoleh langsung dari informan tanpa adanya perantara dari pihak kedua. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan seperti data yang berasal dari kuisisioner, wawancara, ataupun observasi langsung. Sedangkan data sekunder merupakan data yang bersal dari pihak kedua seperti data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber eksternal, yaitu diperoleh dari kuesioner yang dijawab oleh responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan skala likert interval. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut :

Angka 1 = sangat tidak setuju (STS)

Angka 2 = tidak setuju (TS)

Angka 3 = netral (N)

Angka 4 = setuju (S)

Angka 5 = sangat setuju (SS)

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penyebaran kuesioner/angket, dan terjun langsung untuk menyebarkan kepada 100 sampel yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Variabel Dependen

Variabel dependen/terikat sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (sugiyono, 2012:59). Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang digunakan oleh Anggun (2012)

Tabel 3.1

Indikator Variabel Dependen		
Variabel	Indikator	Indikator Pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. penyampaian SPT tepat waktu 2. pengisian formulir SPT dengan benar 3. pengisian formulir SPT dengan lengkap 4. pengisian formulir SPT dengan jelas	1. Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik 2. Saya akan melaporkan SPT tepat waktu. 3. Saya akan menghitung pajak terhutang dengan jujur dan benar. 4. Saya mengisi formulir SPT dengan benar dan lengkap 5. Saya sebagai wajib pajak yang patuh membayar sanksi administrasi

Sumber : Anggun Kurnia Saraswati (2012)

3.7.2 Variabel Independen

Variabel independen/ bebas sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. (sugiyono, 2012:59). Pengetahuan Perpajakan merupakan variabel bebas (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Pelayanan fiskus (X3).

Tabel 3.2

Indikator Variabel Independen		
Variabel	Indikator	Indikator Pertanyaan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	1. pengetahuan 2. pemahaman 3. pelaporan	1. Saya mengetahui pengertian pajak

		2. Saya mengetahui fungsi pajak 3. Saya mengetahui tata dan cara perpajakan 4. Saya dapat menghitung tarif pajak 5. Saya mengetahui jenis-jenis pajak
Pelayanan Fiskus (X2)	1. pelayanan 2. penyuluhan 3. kemudahan membayar pajak	1. Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik. 2. Saya merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat menambah pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. 3. Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan. 4. Cara membayar pajak mudah dan efisien.
Sanksi Pajak (X3)	1. sanksi dalam meningkatkan kedisiplinan wajib pajak 2. sanksi yang tegas 3. sanksi sesuai pelanggaran 4. sanksi sesuai UU	1. sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran. 3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya

		<p>pelanggaran yang sudah dilakukan.</p> <p>4. Saya membayar, menyetor, dan melaporkan pajak dengan benar untuk menghindari sanksi pajak.</p>
--	--	---

Sumber : Winda Kurnia Fikriningrum (2012), Yesi Mutia Basri

(2012), Harjanti Puspa Arum (2012), Data Diolah Peneliti

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2012). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *pearson correlation*. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansi di bawah 0,05 atau *pearson correlation* > *r*-tabel maka butir pertanyaan itu dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2012). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dilakukan uji statistik dengan cara melihat *cronbach alpha* jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Ghozali, 2012).

3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Ghozali (2012:160) mengatakan bahwa uji normalitas dilakukan dengan tujuan menguji dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual apakah memiliki distribusi normal. Model regresi dikatakan baik jika memiliki distribusi data normal atau data yang mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi data tersebut berdistribusi normal atau tidak normal yaitu dengan:

a. Analisis Grafik

Pada prinsipnya, normalitas data dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal yang terdapat dalam grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. (Ghozali, 2012:163)

b. Uji Kolmogorov-Smirnov

Menurut Ghozali (2012:32) uji *kolmogorov-smirnov* dilakukan dengan membuat hipotesis berupa:

H_0 : Data residual terdistribusi normal, jika $\text{sig. 2-tailed} > \alpha = 0,05$

H_a : Data residual tidak terdistribusi normal, jika $\text{sig. 2-tailed} < \alpha = 0,05$

4. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2012:91) mengatakan bahwa tujuan uji multikolinieritas yaitu untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar satu sama lain atau semua variabel bebas (independen) dalam model regresi. Tidak terjadi korelasi antara variabel independen atau tidak terjadi multikolinear dapat dikatakan sebagai model regresi yang baik. Hipotesis berikut digunakan untuk mendeteksi adanya multikolonieritas dengan menggunakan dasar keputusan *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF):

1. *Tolerance value* < 0,10 atau $VIF > 10$ = terjadi multikoleneartitas
2. *Tolerance value* > 0,10 atau $VIF < 10$ = tidak terjadi multikoleneartitas

5. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastistas memiliki tujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance residual antara pengamatan dalam model regresi. Jika variance dari residual antara pengamatan tetap, maka dapat disebut sebagai homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. (Ghozali,2012:105)

6. Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dapat dikatakan adanya masalah autokorelasi (Ghozali, 2011: 110).

Berikut ini merupakan tabel ada atau tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test)

Tabel 3.3

Pengambilan keputusan menggunakan uji *Durbin – Watson*

Range	Keputusan
$0 < d < dL$	Tidak terjadi masalah autokorelasi yang positif
$dL < d < du$	Tidak terjadi masalah autokorelasi positif
$Du < d < 4-du$	Tidak ada masalah autokorelasi
$4-du < d < 4-dL$	Tidak terjadi masalah autokorelasi negative
$4-dL < d < 4$	Tidak terjadi masalah autokorelasi negatif

Sumber : Imam Ghozali, 2011

3.9 Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2012:206) yaitu:

“Kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, metakulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi komputer berupa SPSS (*Statistical Package*

For Social Science). Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenal pengaruh dari kedua variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun simultan.

Pengujian Hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

1) Analisis Regresi Berganda

Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan oleh analisis regresi berganda untuk menguji perbedaan mutlak. Model regresi dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Ketegasan Sanksi Pajak

X3 = *Pelayanan fiskus*

ϵ = Error

Dalam analisis linier berganda ada tiga uji untuk menguji hipotesis, yaitu uji signifikan simultan (uji statistik f), uji signifikan parameter individual (uji statistik t), dan uji koefisien determinasi (R^2). Dalam penelitian ini akan dilakukan tiga metode pengujian ini untuk menguji hipotesis.

A) Uji F (*F-test*)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. (Ghozali, 2012:98)

H_0 : X_1 dan X_2 tidak mempengaruhi Y

H_1 : minimal ada satu antara X_1 dan X_2 yang mempengaruhi Y

Kriteria keputusan: H_0 ditolak jika $p\text{-value} < \alpha = 0.05$

B) Uji t (Parsial)

Uji t atau uji parsial memiliki tujuan yaitu untuk menguji secara parsial seberapa jauh hubungan variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat) (Ghozali, 2012:98). Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikan 0,05 ($\alpha=5\%$). Kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis yaitu:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ = hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan)
2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ = hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan)

C) Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah suatu alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2012:97). Nilai koefisien determinasi anatar 0 dan 1 atau $0 \leq (R^2) \leq 1$. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti menjelaskan kemampuan memberikan informasi hampir semua informasi dari variabel independen terhadap variasi variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Perkembangan Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen merupakan suatu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berada di bawah dan tanggung jawab langsung Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III di Malang yang bertugas melaksanakan pelayanan, pemeriksaan, dan pengawasan administrasi terhadap wajib pajak dibidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak tidak langsung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Pratama Kepanjen melakukan pengawasan terhadap 20 kecamatan. Sesuai keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-443/KMK.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Pada tahun 2007 DJP melakukan modernisasi terhadap administrasi perpajakan dengan mencanangkan program baru dengan mengganti seluruh KPP diseluruh Indonesia dengan KPP Pratama dengan menggabungkan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan menghapuskan kedua instansi

tersebut. Tujuan dilakukan modernisasi ini untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, tingkat produktivitas pegawai pajak. Dan upaya yang dilakukan DJP dengan konsep modernisasi administrasi perpajakan seperti :

- a. Reformasi etika, moral, dan integritas.
- b. Reformasi pelayanan terhadap wajib pajak.
- c. Reformasi kebijakan perpajakan.
- d. Reformasi pengawasan atau pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Semua itu dilakukan oleh DJP untuk membuat perubahan yang signifikan kearah yang positif guna tercapainya semua tujuan yaitu menjadikan model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

4.1.2. Letak dan bidang usaha perusahaan

1. Tugas pokok dan fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen yang merupakan instansi vertikal yang harus melakukan administrasi bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan diluar wajib pajak badan yang diadministrasikan di KPP

Madya Malang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 pasal 58, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen mempunyai fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 pasal 59, sebagai berikut :

1. Pelayanan pajak.
2. Penyuluhan pajak.
3. Pendaftaran wajib pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
4. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
5. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
7. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan.

8. Pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, penilaian dan pengenaan.
9. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
10. Pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak.
11. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan.
12. Pemeriksaan pajak.
13. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
14. Penyelesaian permohonan konfirmasi status wajib pajak.
15. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak.
16. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak.
17. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak.
18. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
19. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko.
20. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal.
21. Pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan.
22. Pelaksanaan administrasi kantor.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan utama dari organisasi ini untuk menghimpun dana penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam pelaksanaannya dijelaskan secara rinci dalam rencana kinerja

tahunan untuk memudahkan dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian.

2. Profil Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di KPP Pratama Kepanjen sebanyak 86 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan :

Tabel 4.1

Jumlah SDM di KPP Pratama Kepanjen

Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	IV b	1
2.	IV a	6
3.	III d	6
4.	III c	3
5.	III b	14
6.	III a	16
7.	II d	17
8.	II c	20
9.	II b	-
10.	II a	3

Sumber : KPP Pratama Kepanjen

2. Berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel 4.2

Jumlah SDM di KPP Pratama Kepanjen Berdasarkan

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	1
2	S2	6

3	S1/D IV	35
4	D III	18
5	D I	20
6	SMA	6
7	SMP	-
8	SD	-

Sumber : KPP Pratama Kepanjen

3. Letak geografis

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen terletak di Jl.

Raya Kepanjen-Pakisaji KM.4 Jatirejoyoso, Kepanjen 65163

4. Karakteristik wilayah

Tabel 4.3

Wilayah Kerja

No	Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak
1	Donomulyo	3.079
2	Kalipare	3.337
3	Pakisaji	12.276
4	Bantur	3.148
5	Gondanglegi	4.836
6	Sumbermanjing wetan	3.418
7	Turen	10.389
8	Kromengan	3.388
9	Wajak	3.530
10	Bululawang	6.679
11	Ngajum	3.517
12	Kepanjen	15.029
13	Gedangan	1.922
14	Pagak	2.580
15	Sumber pucung	5.495
16	Pagelaran	3.454
17	Wagir	8.468
18	Dampit	6.955
19	Tirtoyudo	2.048
20	Wonosari	2.558

Sumber : KPP Pratama Kepanjen

5. Karakteristik Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 4.4

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama

Kepanjen

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar Awal Tahun	Penambahan WPOP Terdaftar Akhir Tahun
2014	69.934	9.272
2015	77.373	7.439
2016	84.293	6.920
2017	94.521	10.288

Sumber : KPP Pratama Kepanjen

4.1.3. Visi dan Misi KPP Pratama Kepanjen

Visi : menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.

Misi : menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

4.1.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Jabatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen dipimpin oleh Kepala Kantor yang membawahi satu kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal dan sembilan Kepala seksi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 pasal 60, sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling pelaksanaan ISISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat

pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran wajib pajak.

4. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dalam himbauan kepada wajib pajak.

9. Kelompok Jabatan Fungsional pemeriksa dan penilaian PBB

Mempunyai tugas menilai dan mengelola objek PBB sektor P3 melalui kegiatan pemetaan objek PBB P3 dan pertumbuhan pokok ketetapan PBB sektor P3.

Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pratama Kepanjen adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Kapanjen



Sumber : KPP Pratama Kapanjen

4.2 Analisis Data

4.2.1 Deskripsi Responden

pada kpp pratama kapanjen peneliti menyebar 120 kuesioner kepada wajib pajak secara langsung yang melakukan kewajiban perpajakannya. Kuisisioner diberikan berdasarkan kriteria wajib pajak. Setelah dilakukan perhitungan hasil kuisisioner yang diisi oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kapanjen.

Tabel 4.5

Kuisisioner Yang Disebar

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Kuisisioner disebar	120	120%
2	Kuisisioner kembali	100	100%
3	Kuisisioner tidak valid	2	2%
4	Kuisisioner diolah	98	98%

Sumber : Data Diolah Peneliti

Dari tabel diatas terdapat 100 kuisisioner yang disebar. Dari 100 kuisisioner tersebut yang dapat diolah sejumlah 98 kuisisioner. Sedangkan 2 kuisisioner diantaranya tidak valid karena banyak dari point-point tidak terisi.

4.2.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dapat dilihat melalui demografi responden. Demografi responden pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir. Pada tabel dihalaman berikut dapat dilihat ringkasan demografi responden.

Tabel 4.6

Demografi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-laki	68	68
Perempuan	32	32
Total	100	100

Sumber : data dioleh peneliti

Tabel 4.7

Demografi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase (%)
21-30 tahun	35	35
31-40 tahun	26	26
41-50 tahun	29	29
Diatas 50 tahun	12	12

Total	100	100
-------	-----	-----

Sumber : data dioleh peneliti

Tabel 4.8

Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
SMP-SMA	26	26
D4-S1	51	51
S2	23	23
Total	100	100

Sumber : data dioleh peneliti

Tabel 4.9

Demografi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Presentase (%)
PNS	75	75
Wiraswasta	25	25
Total	100	100

Sumber : data dioleh peneliti

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 68%, dan sisanya merupakan perempuan sebesar 32%. Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia antara 31 tahun hingga 40 tahun sebesar 26%. Sementara itu responden berusia 41 tahun hingga 50 tahun sebesar 29%, responden berkisar antara umur 21 tahun hingga 30 tahun sebesar 35%, dan sisanya yaitu 12% berusia diatas 50 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan SMP hingga SMA sebesar 26 %, D4 sampai S1 sebesar 51 %, S2 sebesar 23 %. Dan dilihat dari jenis pekerjaan diketahui bahwa 75% sebagai pns dan sisanya 25% merupakan wiraswasta.

4.2.3 Statistika Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian

Deskripsi statistik dari variable terikat yakni kepatuhan wajib pajak (y), dari variable bebas antara lain pengetahuan perpajakan(x1), pelayanan fiskus (x2), dan sanksi pajak (x3), akan diketahui melalui nilai frekuensi dari masing-masing variable, dan variable tersebut memiliki beberapa indicator pertanyaan yang akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut.

4.2.3.1 Analisis deskriptif variabel pengetahuan perpajakan (x1)

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variable pengetahuan perpajakan didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variable pengetahuan perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10

Statistik Deskriptif Pengetahuan Perpajakan (X1)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1.1	98	3.00	5.00	4.0306	.54591
x1.2	98	2.00	5.00	4.0204	.51732
x1.3	98	2.00	5.00	3.7245	.72908
x1.4	98	2.00	5.00	3.6531	.77462
x1.5	98	2.00	5.00	3.8980	.71059
Valid N (listwise)	98				

Sumber : data diolah peneliti

Berdasarkan table diatas, bisa disimpulkan bahwa pertanyaan pertanyaan dari variabel x1 memiliki nilai minimum skor 2 dan nilai maksimum 5 dan rata-rata jawaban responden 3,724 mendekati nilai maksimum jawban. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden menyetujui pertanyaan tersebut.

4.2.3.2. Analisis deskriptif variable pelayanan fiskus (x2)

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variable pelayanan fiskus didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarakan pada respoden. Variasi jawaban responden untuk variable pelayanan fiskus dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.11

Statistik Deskriptif Pelayanan Fiskus (X2)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x2.1	98	2.00	5.00	4.0918	.62733
x2.2	98	2.00	5.00	3.9490	.67918
x2.3	98	2.00	5.00	3.8367	.68404
x2.4	98	2.00	5.00	4.0306	.69541
Valid N (listwise)	98				

Sumber : data diolah peneliti

Berdasarkan table diatas, bisa disimpulkan bahwa pertanyaan pertanyaan dari variabel x2 memiliki nilai minimum skor 2 dan nilai maksimum 5 dan rata-rata jawaban responden 3,8367 mendekati nilai maksimum jawban. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden menyetujui pertanyaan tersebut.

4.2.3.3. Analisis deskriptif variable sanksi pajak (x3)

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variable sanksi pajak didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan- pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarakan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variable sanksi pajak dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.12

Statistik Deskriptif Sanksi Pajak (X3)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x3.1	98	2.00	5.00	4.0000	.73218
x3.2	98	2.00	5.00	4.0714	.67732
x3.3	98	2.00	5.00	4.0510	.63201
x3.4	98	1.00	5.00	4.0816	.69865
Valid N (listwise)	98				

Sumber : data diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas, bisa disimpulkan bahwa pertanyaan pertanyaan dari variabel x3 memiliki nilai minimum skor 1 dan nilai maksimum 5 dan rata-rata jawaban responden 4,000 mendekati nilai maksimum jawban. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden menyetujui pertanyaan tersebut.

4.2.3.4. Analisis deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak(Y)

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variable kepatuhan wajib pajak didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan- pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarakan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.13

Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
y1	98	1.00	5.00	4.2755	.68535
y2	98	1.00	5.00	4.1020	.69594
y3	98	1.00	5.00	4.1429	.65802
y4	98	1.00	5.00	4.1327	.66794
y5	98	1.00	5.00	4.1224	.67755
Valid N (listwise)	98				

Sumber : data diolah peneliti

Berdasarkan table diatas, bisa disimpulkan bahwa pertanyaan pertanyaan dari variabel x1 memiliki nilai minimum skor 1 dan nilai maksimum 5 dan rata-rata jawaban responden 4,1020 mendekati nilai maksimum jawban. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden menyetujui pertanyaan tersebut.

4.2.4. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan pada semua variable bebas. Pengujian validitas dengan melihat signifikansi atau nilai probabilitas, dan untuk pengujian reliabilitas dengan melihat nilai *cronbach alpha*. Hasil uji validitas pada penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

$$R \text{ tabel} = n(98) = 0,1654 \quad \alpha = 0,05$$

$$R \text{ hitung} > R \text{ tabel} = \text{valid}$$

$$R \text{ hitung} < R \text{ tabel} = \text{tidak valid}$$

Tabel 4.14

Hasil Uji Validitas

Variabel	R hitung	R tabel	Sig.	Keterangan
X1.1	0,845	0,1654	0,000	Valid
X1.2	0,815	0,1654	0,000	Valid
X1.3	0,866	0,1654	0,000	Valid

X1.4	0,865	0,1654	0,000	Valid
X1.5	0,828	0,1654	0,000	Valid
X2.1	0,771	0,1654	0,000	Valid
X2.2	0,835	0,1654	0,000	Valid
X2.3	0,835	0,1654	0,000	Valid
X2.4	0,820	0,1654	0,000	Valid
X3.1	0,901	0,1654	0,000	Valid
X3.2	0,888	0,1654	0,000	Valid
X3.3	0,830	0,1654	0,000	Valid
X3.4	0,621	0,1654	0,000	Valid
Y1	0,869	0,1654	0,000	Valid
Y2	0,846	0,1654	0,000	Valid
Y3	0,910	0,1654	0,000	Valid
Y4	0,906	0,1654	0,000	Valid
Y5	0,872	0,1654	0,000	Valid

Sumber : data diolah peneliti

Tabel Uji Reliabilitas sebagai berikut :

Tabel 4.15

Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.927	5

Sumber : data diolah peneliti

Tabel 4.16

Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.824	4

Sumber : data diolah peneliti

Tabel 4.17

Hasil Uji Reliabilitas Pelayanan Fiskus (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.832	4

Sumber : data diolah peneliti

Tabel 4.18

Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.892	5

Sumber : data diolah peneliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa masing masing variabel bebas memiliki nilai probabilitas < nilai nyata (5%), dan nilai koefisien alpha (*cronbach alpha*)> 0,06. Dengan demikian tiap item pernyataan pada variabel pengetahuan perpajakan(x1), pelayanan fiskus(x2), dan sanksi pajak(x3) dinyatakan valid atau reliable.

4.2.5. Uji Asumsi Klasik

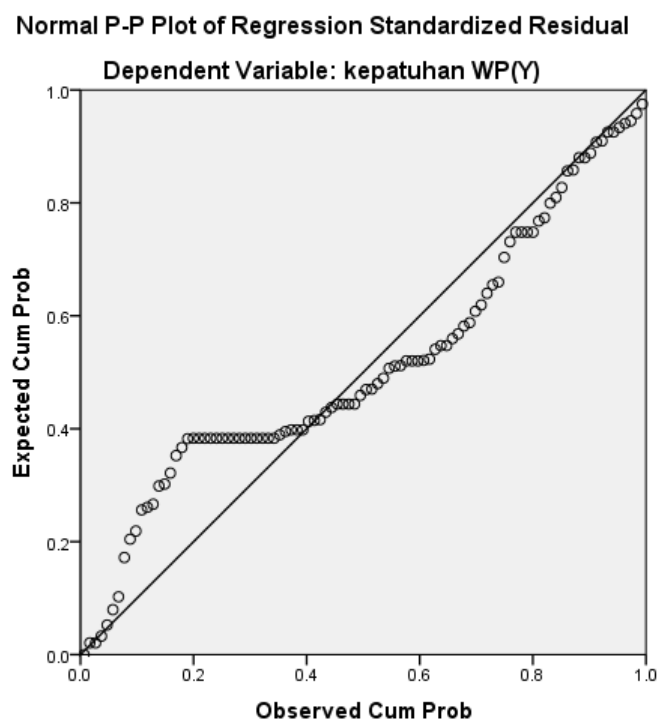
4.2.5.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji kenormalan model regresi adalah one sample Kolmogorov-smirnov test dan normal p-plot. Distribusi data dinyatakan normal

apabila nilai p dari one sample Kolmogorov-smirnov test $> 0,05$. Sedangkan tingkat normal menurut p-plot apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas



Sumber : data diolah peneliti

Berdasarkan gambar diatas, menurut metode pengujian p-plot dapat disimpulkan bahwa pola grafik diatas memenuhi asumsi normalitas, terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonalnya

4.2.5.2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak memiliki korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF harus lebih dari 10.

Tabel 4.19

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	11.957	2.832		4.222	.000		
pengetahuan perpajakan(x1)	.112	.116	.104	.961	.339	.819	1.222
pelayanan fiskus(x2)	.299	.143	.220	2.092	.039	.868	1.152
sanksi pajak(x3)	.117	.151	.088	.778	.438	.758	1.320

a. Dependent Variable: kepatuhan WP(Y)

Sumber : data diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF ketiga variabel bebas kurang dari 10 dan nilai tolerancinya lebih dari 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas, maka model regresi ini layak untuk dipakai.

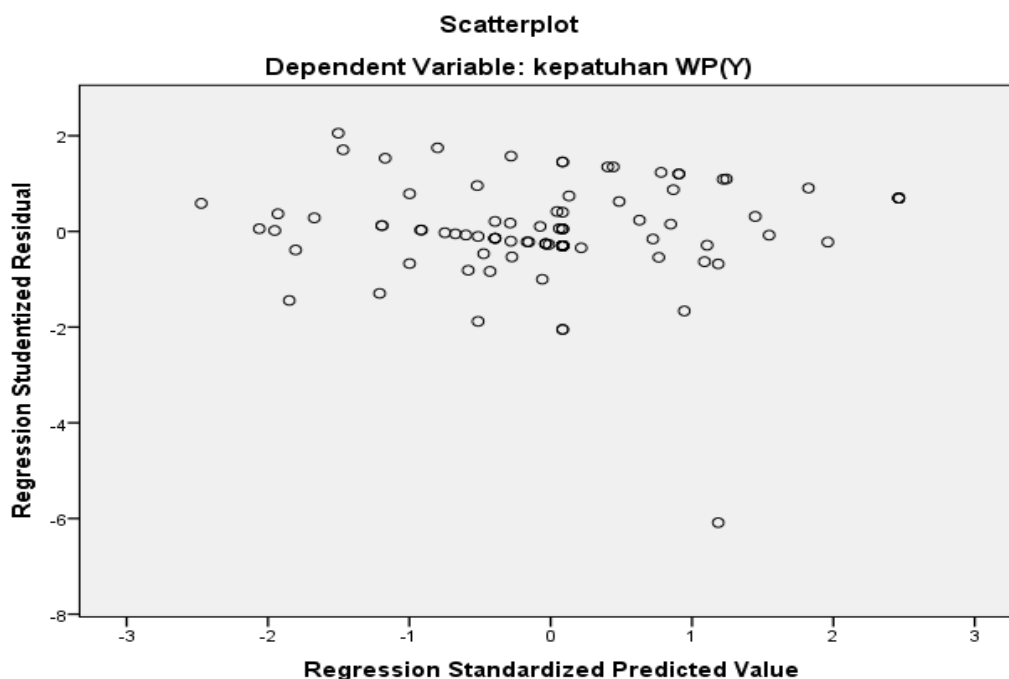
4.2.5.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika varian residu berbeda berarti terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Untuk mengetahui heteroskedastisitas dapat dilihat dari tidak adanya pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar scatterplots, serta titik –titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar scatterplots dibawah ini :

Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : data diolah peneliti

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedasitas karena titik tidak berkumpul dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

4.2.5.4. Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dapat dikatakan adanya masalah autokorelasi.

Tabel 4.20

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.314 ^a	.098	.070	2.87369	1.785

a. Predictors: (Constant), sanksi pajak(x3), pelayanan fiskus(x2), pengetahuan perpajakan(x1)

b. Dependent Variable: kepatuhan WP(Y)

Sumber : data diolah peneliti

$$\text{Nilai } du = k(3); n(98)=1,7345$$

$$4-du=4-1,7345=2,2655$$

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan tidak ada gejala autokorelasi. Karena $du(1,7345) < d(1,785) < 4-du(2,2655)$.

4.2.6. Uji Regresi Berganda

Analisa regresi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (x) terhadap variabel dependen(y). dalam penelitian ini

menggunakan analisis linier berganda dikarenakan penelitian ini menguji dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Tabel 4.21
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	11.957	2.832		4.222
	pengetahuan perpajakan(x1)	.112	.116	.104	.961
	pelayanan fiskus(x2)	.299	.143	.220	2.092
	sanksi pajak(x3)	.117	.151	.088	.778

a. Dependent Variable: kepatuhan WP(Y)

Sumber : data diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas maka didapatkan hasil dari perumusan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y=11,957+0,112X_1+0,299X_2+0,117X_3$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Koefisien variabel pengetahuan perpajakan (x1) sebesar 0,112 dan mempunyai nilai koefisien positif. Hal ini mempunyai makna apabila adanya peningkatan 1 satuan terhadap tingkat pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat mempermudah wajib pajak maupun dalam membayar pajak.

B. Koefisien variabel pelayanan fiskus (x2) sebesar 0,299 dan mempunyai nilai koefisien positif. Hal ini mempunyai makna apabila adanya peningkatan 1 satuan terhadap tingkat pelayanan fiskus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya pelayanan fiskus maka wajib pajak merasa nyaman dan sangat terbantu serta dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar administrasi perpajakan.

C. Koefisien variabel sanksi pajak (x3) sebesar 0,112 dan mempunyai nilai koefisien positif. Hal ini mempunyai makna apabila adanya peningkatan 1 satuan terhadap sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak maka membuat wajib pajak taat membayar pajak agar tidak terkena sanksi pajak.

4.2.6.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai adjusted R square dalam tabel berikut:

Tabel 4.22

Hasil uji koefisien determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.314 ^a	.098	.070	2.87369

a. Predictors: (Constant), sanksi pajak(x3), pelayanan fiskus(x2), pengetahuan perpajakan(x1)

Sumber : data diolah peneliti

Menurut tabel diatas nilai R square adalah 0,098 hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas pengetahuan perpajakan(x1), pelayanan fiskus (x2), sanksi pajak (x3) tidak memiliki pengaruh secara signifikan hanya sebesar 9,8% dan sisanya di pengaruhi oleh factor lain sebesar 90,2%

4.2.6.2. Uji Parameter Simultan (Uji F)

Uji Parameter Simultan (Uji F) bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen(x) atau lebih secara simultan terhadap variabel dependen (y). apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka variabel independen (x) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (y). selain itu juga dapat dilihat dari nilai signifikannya $< 0,05$ maka variabel independennya secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.23

Hasil Uji Parameter Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	84.799	3	28.266	3.423	.020 ^b
	Residual	776.262	94	8.258		
	Total	861.061	97			

a. Dependent Variable: kepatuhan WP(Y)

b. Predictors: (Constant), sanksi pajak(x3), pelayanan fiskus(x2), pengetahuan perpajakan(x1)

sumber : data diolah peneliti

$$F_{tabel} = f(k ; n-k) = f(3; 98-3) = f(3 ; 95) = 2,70$$

Berdasarkan tabel diatas hasil uji F diatas menyatakan bahwa nilai F hitung sebesar 3,423 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,70. Jadi nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ serta nilai signifikannya sebesar $0,020 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel independen pengetahuan perpajakan(x1), pelayanan fiskus(x2), dan

sanksi pajak(x3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak(y).

4.2.6.3. Uji Parameter Parsial (Uji t)

Uji Parameter Parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas(x) secara parsial terhadap variabel terikat(y). apabila nilai t hitung > t tabel maka variabel bebas (x) berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (y). selain itu juga dapat dilihat dari nilai signifikannya <0,05 maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 4.24

Hasil Uji Parameter Parsial (Uji t)

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	11.957	2.832		4.222
pengetahuan perpajakan(x1)	.112	.116	.104	.961
pelayanan fiskus(x2)	.299	.143	.220	2.092
sanksi pajak(x3)	.117	.151	.088	.778

a. Dependent Variable: kepatuhan WP(Y)

Sumber : data diolah peneliti

T tabel = t (a/2 ; n-k-1)= t (0,05/2 ; 98-3-1)= t(0,025 ; 94)= 1,985

Berdasarkan hasil pengujian diatas didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan perpajakan (x1) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (y) tidak berpengaruh secara parsial dapat dilihat dari nilai signifikan

pengetahuan perpajakan (x_1) yakni 0,339 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,961 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Variabel pelayanan fiskus (x_2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (y) berpengaruh secara parsial dapat dilihat dari nilai signifikan pelayanan fiskus (x_2) yakni 0,039 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,092 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel sanksi pajak (x_3) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (y) tidak berpengaruh secara parsial dapat dilihat dari nilai signifikan sanksi pajak (x_3) yakni 0,438 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,778 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak.

4.3. Pembahasan

Pajak bersifat wajib dan memaksa dan tidak memiliki timbal balik secara langsung. Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak merupakan sifat yang penting dimiliki bagi setiap wajib pajak. Semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka semakin bertambah juga pendapatan disektor pajak. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai cara meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Karena pendapatan pajak ini digunakan untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana. Penelitian-penelitian

yang dilakukan para peneliti sangat membantu pemerintah untuk mencari cara agar wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya dan mengetahui faktor apa saja yang membuat wajib pajak tidak patuh membayar pajak dengan melihat analisa dari beberapa penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan tiga variabel antara lain pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.

1. Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, untuk analisis secara parsial variabel pengetahuan perpajakan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan (x_1) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikan 0,399 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,961 lebih kecil daripada t tabel sebesar 1,985 yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan(x_1) tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (y). Selain itu, seberapa besar wajib pajak mengetahui tentang system dan tata cara perpajakan yang berlaku dapat meningkatkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya dari Pancawati (2011) dan Nisa' (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan fenomena diatas diketahui bahwa

pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ini dikarenakan tingkat pendidikan dari kebanyakan responden merupakan SMA- S2 hal ini yang membuat pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melainkan tingkat pendidikan wajib pajak yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nisa', 2016).

2. Pelayanan Fiskus

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, untuk analisis secara parsial variabel pelayanan fiskus (x_2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (y) berpengaruh positif dan signifikan dapat dilihat dari nilai signifikan pelayanan fiskus (x_2) yakni 0,039 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,092 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus(x_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak(y).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya dari Winda (2012) dan Harjanti (2012) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus (x_2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (y). selain itu penelitian lain yang mendukung penelitian ini yaitu penelitian dari Pancawati (2011) dan Ngadiman (2015) juga mendukung hasil penelitian ini. Berdasarkan fenomena diatas semakin baiknya pelayanan fiskus maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan

dengan pelayanan yg ditingkatkan wajib pajak semakin merasa nyaman dan terbantu sehingga wajib pajak bersedia secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya(Widagsono, 2017).

3.Sanksi Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, untuk analisis secara parsial variabel sanksi pajak (x3) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (y) tidak berpengaruh dapat dilihat dari nilai signifikan sanksi pajak (x3) yakni 0,438 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,778 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak. Fenomena ini didukung dengan adanya kesamaan pada penelitian terdahulu yaitu Oktaviane (2013) bahwa sanksi pajak (x3) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (y) yang dilakukan di KPP Manado dan KPP Belitung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan pengujian secara statistik yang telah diinterpretasikan, diketahui bahwa hanya variabel pelayanan fiskus yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan responden pada penelitian ini memiliki pengetahuan perpajakan dan sebagian besar merupakan memiliki pendidikan S1 – S2 yang paham akan administrasi perpajakan

dan taat aturan dan sanksi yang ada. Maka dari itulah hasil yang didapatkan pada penelitian ini variabel X1 dan variabel X3 tidak berpengaruh. Sedangkan variabel pelayanan fiskus(x2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak(y). Hal ini dikarenakan semakin bagus pelayanan dari fiskus meningkatkan pula kepercayaan wajib pajak serta merasa nyaman, dan taat dalam membayar pajaknya. Pemerintah diharapkan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak supaya wajib pajak taat dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kepanjen dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari adanya pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuisioner untuk menguji hipotesis. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen. Kuisioner disebar dengan melakukan survey dan disebar langsung ke KPP Pratama Kepanjen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Selanjutnya pengujian yang dilakukan adalah uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis untuk mengintreprestasikan data. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

Variabel pengetahuan perpajakan (x_1) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (y) tidak berpengaruh dapat dilihat dari nilai signifikan pengetahuan perpajakan (x_1) yakni 0,339 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,961 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel pelayanan fiskus (x_2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (y) berpengaruh positif dan signifikan dapat dilihat dari nilai signifikan pelayanan fiskus (x_2) yakni 0,039 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,092 lebih

besar dari t tabel sebesar 1,985. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel sanksi pajak (x3) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (y) tidak berpengaruh dapat dilihat dari nilai signifikan sanksi pajak (x3) yakni 0,438 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,778 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban wajib pajak.

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dan hipotesis ketiga ditolak karena pengetahuan perpajakan (x1) dan sanksi pajak (x3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (y). dan hanya hipotesis kedua yang di terima yaitu pelayanan fiskus(x2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak(y).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran :

1. Bagi Institusi (KPP Pratama Kepanjen)

Bagi KPP Pratama Kepanjen untuk meningkatkan lagi pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan meningkatkan lagi sarana prasarana yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan administrasi pajak seperti adanya pos bantuan pajak, jemput pajak, meningkatkan dan modernisasi sistem aplikasi perpajakan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya semoga kekurangan dalam penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menganalisis lebih mendetail faktor-faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya menambah variabel-variabel lain yang lebih mendukung keakuratan dalam penelitian selanjutnya seperti variabel tingkat pendidikan menurut Wulandari (2014), dan Suyanto (2014) serta variabel modernisasi system administrasi pajak menurut Rahayu (2019) dan Lingga (2019).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Arum, Harjanti Puspa. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Diperoleh tanggal 12 Maret 2018 dari http://eprints.undip.ac.id/35890/1/SKRIPSI_ARUM.pdf

Devano, Sony. Dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana

Fathoni, Agus Ahmad. (2016). *Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Ancaman Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Skripsi (tidak di publikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Fikriningrum, Windi Kurnia. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*. Diperoleh tanggal 12 Maret 2018 dari <http://eprints.undip.ac.id/36149/1/FIKRININGRUM.pdf>

Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hardiningsih, Pancawati., Yulianawati, Nila. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3 (1), 126-142

Inayah, Gazi. (2003). *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana

katadata.co.id : Sri Mulyani Waspadaai Efek Negatif Tax Amnesty Bagi Perekonomian. (26 Agustus 2016)

Muliari, Ni Ketut., & Setiawan, Putu Ery. (2010). *Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur*. Skripsi (di publikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali.

Ngadiman dan Daniel huslin. (2015). *Pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. Diperoleh tanggal 12 maret 2018. *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225-241

Nisa', Afifatun. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

di Kabupaten Sumenep, Skripsi (tidak di publikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Prof. Dr. Mardiasmo,(2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : ANDI

Qadim, Abdul.(2002). *Al-Amwal fi daulah al-Khilafah. Dar al-ilmi lilmalayin, Edisi terjemah oleh Ahmad dkk (Penerjemah). Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariq Al-Izzah

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Santi, Anisa Nirmala. (2012). *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)*. Diperoleh tanggal 12 Maret 2018 dari http://eprints.undip.ac.id/35025/1/Skripsi_01.pdf

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. “*Pengaruh Sikap Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Selatan*”. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Negeri Syarif Hidayatul

Waluyo. 2010. *Perpajakan indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Widagsono, Seto. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Skripsi (tidak di publikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Winerungan, Oktaviane Lidya . (2013). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Tidak Memiliki Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado dan KPP Blitung*. Jurnal EMBA, 1(3), 960-970

Lampiran 1

Data Responden

Nama Responden :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pendidikan Responden :

Berilah tanda silang (X) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing pendapat yang Anda berikan.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik					
2	Saya akan melaporkan SPT tepat waktu					
3	Saya akan menghitung pajak terhutang dengan jujur dan benar					
4	Saya mengisi formulir SPT dengan benar dan lengkap					
5	Saya sebagai wajib pajak yang patuh membayar sanksi administrasi					

Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1	Saya mengetahui pengertian pajak					
2	Saya mengetahui fungsi pajak					

3	Saya mengetahui tata dan cara perpajakan					
4	Saya dapat menghitung tarif pajak					
5	Saya mengetahui jenis-jenis pajak					

Variabel Pelayanan Fiskus

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1	Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik.					
2	Saya merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat menambah pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.					
3	Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan.					
4	Cara membayar pajak mudah dan efisien.					

Variabel Sanksi Pajak

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.					
2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.					
3	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.					
4	Saya membayar, menyetor, dan melaporkan pajak dengan benar untuk menghindari sanksi pajak.					

Lampiran 2

No	Nama	Gender (P/W)	pendidikan	umur	Pekerjaan	Variabel Y					total	Variabel X1					total	Variabel X2				total	Variabel X3				total
1	Lukito	30	P	swasta	Sma	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
2	hadi p	35	P	swasta	Sltp	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
3	Fitri	32	W	swasta	Sma	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	2	2	2	2	8	4	4	4	4	16
4	Windu	51	P	swasta	s1	4	2	4	4	4	18	4	4	3	3	3	17	5	5	4	3	17	2	2	3	4	11
5	amarudin	40	P	swasta	Sma	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	3	4	3	4	14
6	Rahel	31	W	Swasta	Sltp	4	3	3	3	3	16	3	3	3	3	3	15	3	4	4	4	15	3	3	3	4	13
7	rustamin	35	P	Swasta	Sltp	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
8	Alex	26	P	swasta	Sma	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
9	miftahul	26	P	swasta	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
10	samiasih	40	W	swasta	sma	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
11	Amir	39	P	swasta	sma	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
12	suparja	46	P	swasta	sma	4	4	5	4	4	21	5	4	4	4	5	22	4	2	4	4	14	5	5	5	4	19
13	Ali	43	P	swasta	sma	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
14	Rina	45	W	swasta	s1	3	3	3	3	3	15	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
15	farid	25	P	swasta	s1	4	4	3	4	4	19	4	4	4	3	4	19	4	2	2	2	10	4	4	4	4	16
16	soeryo	39	P	swasta	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	3	2	2	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
17	nining	34	W	swasta	Sma	3	3	3	3	3	15	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
18	sulis	26	W	swasta	sltp	5	4	4	4	4	21	4	4	4	3	4	19	4	5	4	5	18	5	5	5	5	20
19	gunawan	38	P	swasta	s2	4	4	4	4	4	20	3	4	4	3	4	18	4	4	3	4	15	4	4	4	3	15
20	siti roikanah	49	W	pns	s2	4	4	4	4	4	20	4	4	2	2	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
21	siti muarofah	52	W	pns	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	2	2	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
22	m. Nurkhan	62	P	pns	s1	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16

23	nur khasan	53	P	pns	s2	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
24	m.daroini	49	P	pns	s2	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
25	ropingi	59	P	pns	s2	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
26	nur qomariyah	49	P	pns	s2	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
27	rosa eka	21	W	Swasta	s1	3	3	4	4	3	17	5	5	4	4	5	23	4	5	3	4	16	5	5	5	5	20
28	rizky	21	W	swasta	s1	4	3	3	4	4	18	3	2	2	2	3	12	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15
29	wiro unggul	42	P	swasta	d4	5	5	4	5	4	23	5	5	4	4	4	22	5	4	3	3	15	4	5	4	4	17
30	imron syafi'i	47	P	swasta	sma	4	4	4	4	4	20	4	4	3	3	3	17	5	5	4	4	18	4	3	2	4	13
31	ahmad rosyidi	39	P	pns	s2	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	4	19	3	4	3	4	14	4	4	4	4	16
32	Asti	32	W	pns	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
33	umi farikha	50	W	pns	s1	5	4	5	5	5	24	4	4	4	3	3	18	4	3	3	4	14	3	3	3	4	13
34	nur azizah	43	W	pns	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
35	yusri agustiawan	41	P	pns	s2	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
36	marwianto	46	P	pns	sma	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	4	19	4	4	4	4	16	5	5	4	4	18
37	ifa latifah	28	W	Pns	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
38	wisnu	24	P	pns	s1	4	4	5	3	4	20	4	4	3	3	4	18	3	3	4	4	14	4	3	4	4	15
39	leha	28	W	pns	s1	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
40	fachrudin	24	P	pns	s1	5	5	5	5	5	25	4	3	4	3	5	19	4	3	3	4	14	3	4	4	4	15
41	asep ginanjar	26	P	pns	s2	4	4	4	4	4	20	4	4	3	3	3	17	4	4	3	3	14	4	4	4	4	16
42	mutiara hasnah	25	W	pns	s1	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
43	romli ahmad	32	P	pns	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
44	epri wahyudi	24	P	pns	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16

45	nurul hidayat	42	P	swasta	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
46	suyanto	50	P	swasta	s2	4	3	4	4	4	19	4	4	3	3	4	18	3	3	3	3	12	2	2	4	3	11
47	wahyu chandra triawan	36	P	Swasta	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	3	3	3	17	3	3	3	3	12	3	3	3	4	13
48	yudi sukarwan	50	P	swasta	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	2	2	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
49	edi pahin	57	P	swasta	s2	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
50	miko	41	P	swasta	s1	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	20	4	3	2	4	13	2	3	4	2	11
51	nisa fatika amalia	23	W	swasta	s1	4	4	4	4	3	19	4	4	4	3	3	18	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16
52	m. Fulky	25	P	swasta	s1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
53	utomo	36	P	swasta	smp	5	4	5	4	4	22	4	4	4	4	4	20	5	5	4	4	18	4	5	4	4	17
54	supriyadi	30	P	swasta	sma	5	5	4	4	4	22	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
55	hanky iwan	40	P	pns	s1	5	5	5	4	4	23	5	5	5	5	5	25	5	5	4	4	18	4	4	4	5	17
56	zainal dwi saputra	31	P	pns	s1	5	5	4	4	4	22	4	4	4	4	4	20	4	3	4	5	16	4	4	3	5	16
57	sudi harjo	40	P	pns	sma	5	3	5	5	5	23	4	4	2	4	2	16	5	4	3	4	16	3	3	4	5	15
58	venny	25	W	swasta	sma	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	4	3	13	3	3	4	3	13
59	saminem	50	W	swasta	smp	5	5	4	2	2	18	5	4	4	5	5	23	5	4	4	3	16	2	3	2	5	12
60	mamang irawanto	38	P	pns	s1	5	5	4	4	3	21	4	4	4	3	4	19	5	4	3	4	16	3	3	4	4	14
61	m. Adib	59	P	pns	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
62	m. Ja'far	23	P	pns	s1	4	4	4	4	4	20	3	4	3	3	3	16	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
63	zainal arifin	34	P	swasta	sma	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
64	helmina	37	W	swasta	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	5	22	5	5	4	4	18	4	4	4	5	17
65	puji	27	P	swasta	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
66	abdul latif	55	P	Pns	s2	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	3	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
67	suyadi	50	P	pns	s2	4	3	3	4	4	18	4	4	2	4	3	17	4	4	2	2	12	2	4	4	4	14

68	muslihah	53	W	pns	s2	4	4	4	4	4	20	4	4	2	2	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
69	afrizal	31	P	pns	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
70	ana susanti	33	W	pns	s2	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
71	zidna ilma	28	P	swasta	s1	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
72	aan andriawan	23	P	swasta	sma	5	4	4	4	4	21	3	4	3	3	3	16	5	4	3	4	16	4	4	4	4	16
73	linda nur	23	W	swasta	s1	4	4	5	5	4	22	3	3	3	3	3	15	4	5	4	5	18	5	5	5	5	20
74	cholifah	23	W	swasta	s1	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	17	4	5	5	5	19
75	mardiah	24	W	swasta	sma	3	4	4	4	5	20	3	3	3	3	3	15	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
76	achmad nurul	29	P	swasta	sma	5	5	5	5	5	25	5	4	4	4	4	21	5	4	4	5	18	5	4	5	5	19
77	zulfa ika	23	W	swasta	sma	5	4	4	5	4	22	3	3	2	2	2	12	4	3	4	5	16	4	5	3	3	15
78	nur hasan	25	P	swasta	s1	5	4	4	4	4	21	3	3	3	3	4	16	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16
79	sudirmo	56	P	pns	s2	5	5	5	5	4	24	3	4	3	3	4	17	5	4	4	5	18	5	5	5	5	20
80	achmad suyuti	50	P	pns	s2	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	4	4	5	5	18	5	5	5	5	20
81	munasik	50	P	pns	s2	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
82	diah ayu	24	W	swasta	s1	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
83	moh safiudin	37	P	swasta	s1	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	17	5	5	5	5	20
84	ainnur rofiq	34	P	swasta	s1	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	17	5	5	5	5	20
85	Afiq	36	P	swasta	s1	5	5	5	5	5	25	4	4	3	4	4	19	5	5	5	5	20	5	5	5	1	16
86	asyiq	33	P	Swasta	s1	3	4	4	4	4	19	4	3	3	3	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
87	a. Taujan	25	P	pns	s1	5	5	5	5	5	25	4	4	3	3	4	18	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15
88	m. Rijal	28	P	pns	s2	5	4	4	5	5	23	4	4	3	3	4	18	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16
89	m. Aqib	25	P	pns	s1	5	4	5	5	5	24	5	5	4	3	5	22	3	2	3	2	10	5	5	5	2	17
90	m. Khurniawan	23	P	swasta	s1	5	4	4	4	5	22	3	4	3	3	4	17	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16
91	Lilis	33	W	swasta	s1	4	5	4	4	5	22	4	4	4	4	4	20	5	4	5	5	19	5	5	5	5	20
92	Rini	29	W	swasta	s1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	3	4	2	4	13	4	5	4	4	17

93	alief aurilia	23	W	swasta	s1	4	4	3	3	4	18	4	4	4	4	4	20	4	3	3	4	14	4	4	4	5	17
94	maksum	54	P	pns	s2	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	4	20	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16
95	romelan	50	P	pns	s2	5	5	5	5	5	25	5	5	4	4	5	23	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
96	moh. Fadli	60	P	pns	s2	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	5	4	5	4	18	2	2	2	2	8
97	Fitri	28	W	swasta	S1	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
98	kiki	24	W	swasta	S1	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
99						3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
100						4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12

Lampiran 3

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Nurussakinah

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Oktober 1996

Alamat Asal : Jl. Sido Rukun, Gg. Sido Rukun Asri No.6 RT.
05/ RW. 02 Desa Ngadilangkung, Kec. Kepanjen,
Kab. Malang

Telepon/Hp : 085749570965

E-mail : nurussakinahnurus@gmail.com

Pendidikan Formal

2001-2002 : TK Annizomiyah Jakarta Selatan

2002-2003 : SDN 09 Pagi Jakarta Selatan

2003-2008 : SDN Ardirejo IV Kepanjen

2008-2011 : SMP 01 Kepanjen

2011-2014 : SMA Islam Kepanjen

2014-2021 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

2015 : English Language Center (ELC) Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Lampiran 4








BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurussakinah

NIM/Jurusan : 14520063/Akuntansi

Pembimbing : Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak.,CA

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Pratama Kepanjen)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	25 Januari 2018	Pengajuan Outline	1. 
2	22 Februari 2018	Proposal	2. 
3	18 Juli 2018	Revisi dan Acc Proposal	3. 
4	26 Juli 2018	Seminar Proposal	4. 
5	5 Juni 2021	Acc Komprehensif	5. 
6	21 Juni 2021	Konsultasi Bab I – V	6. 
7	22 Juni 2021	Acc Keseluruhan (Sidang)	7. 

Malang, 28 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak.,CA

NIP.19720322200801 2 005